

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH
TANGGA DI DESA JUMBA KECAMATAN AMUNTAI SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Penulisan Skripsi

Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH

SUPIATUNNISA

NPM : 2022276

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama

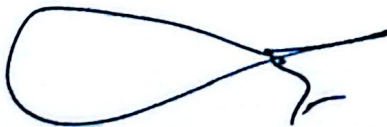
Nama : SUPIATUNNISA
NPM : 2022276
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 74
TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA DI DESA
JUMBA KECAMATAN AMUNTAI SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing skripsi pada program studi administrasi publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, Oktober 2025

Mengetahui

Dosen Pembimbing I,



Agus Surya Dharma, S.Sos. M.AP.
NUPTK : 4142764665137003

Dosen Pembimbing II,



Anna Maryati S.Sos, M.AP.
NUPTK: 3055772673230273



Mengetahui

Pia Karna Prodi Administrasi Publik,


Pia Karna, S.Sos, M.A
NUPTK: 199211004201509021

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul " **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA DI DESA JUMBA KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA** ". Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini, banyak sekali sumbangan pikiran dan pemberian data yang penulis dapatkan dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos. M.AP, CIQnR, CIQaR, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Agus Surya Dharma, S.Sos. M.AP. Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Anna Maryati, S.Sos, M.AP. selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Seluruh dosen beserta staf tata usaha beserta jajarannya yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
5. Kedua orang tua yang selalu mendoakan dan mendukung baik secara moril maupun material.
6. Teman-teman yang telah memberikan motivasi untuk membantu penyelesaian proposal skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian proposal skripsi ini yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan. Kritik dan saran serta tanggapan yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan proposal skripsi ini.

Amuntai, oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	9
B. Tinjauan Teoritis	10
C. Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Lokasi Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Tipe Penelitian.....	32
D. Data Dan Sumber Data	33
E. Desain Operasional Penelitian	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data	37
H. Uji Kredibilitas Data.....	37
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran.....	28
------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan.....	31
Tabel 3.2 Instrumen Penelitian.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan sampah rumah tangga merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah, termasuk di Desa Jumba, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sampah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, maupun keindahan desa.

Sampah sejatinya dapat dikelola sejak dari sumbernya melalui upaya pemilahan antara sampah organik dan anorganik, namun fenomena yang terjadi di Desa Jumba menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum melakukan pemilahan tersebut. Sampah organik seperti sisa makanan dan dedaunan masih tercampur dengan sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan kaleng. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan

Selain itu, di beberapa titik wilayah Desa Jumba terlihat adanya tumpukan sampah dalam jumlah cukup banyak, yang menandakan tingginya volume sampah yang tidak terkelola dengan baik. Tumpukan sampah tersebut tidak hanya menimbulkan bau tidak sedap dan pemandangan yang kurang enak dilihat, tetapi juga berpotensi menjadi sumber penyakit serta mencemari lingkungan sekitar.

Permasalahan lain yang turut memperburuk kondisi pengelolaan sampah di Desa Jumba adalah ketidakteraturan jadwal pengangkutan sampah. Jadwal

angkutan yang tidak konsisten menyebabkan sebagian sampah rumah tangga menumpuk terlalu lama, sehingga mempercepat proses pembusukan dan menimbulkan masalah kebersihan lingkungan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di tingkat desa belum berjalan secara optimal. Padahal, pemerintah telah mengatur secara jelas mengenai pengelolaan sampah melalui berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya:

mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati (PERBUB) No. 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara (JAKTRADA) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga. Pokok kebijakan dalam (JAKTRADA) ini adalah dalam Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yaitu. pembatasan timbunan sampah, pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik.

Pada pasal 1 di sebutkan bahwa Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah Spasifik. Sedangkan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lain lainnya.

Dalam JAKTRADA ini disebutkan Pada pasal 3 ayat (3) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di lakukan

melalui pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari TPST menuju TPA, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian. merupakan tindakan yang dilakukan, baik oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Keberhasilan pengimplementasian kebijakan tidak terlepas dari peran berbagai pihak.

Berdasarkan kebijakan tersebut, seharusnya pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengimplementasikan strategi pengelolaan sampah rumah tangga melalui penyediaan sarana pemilahan, pembentukan petugas kebersihan, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan. Namun pada kenyataannya, implementasi kebijakan dan strategi tersebut belum berjalan efektif di Desa Jumba.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Desa Jumba, apa saja kendala yang dihadapi, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di tingkat desa.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan peneliti mendapati bahwa di Desa Sungai Durait Tengah belum maksimal dalam pelaksanaan kebijakan

dan strategi dalam pengelolaan sampah Rumah tangga dan sampah Sejenis Sampah Ruma Tangga, dimana terdapat fenomena masalah yang peneliti dapat yaitu:

1. Sebagian besar masyarakat belum melakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat dan cara memilah sampah dan juga tidak ada fasilitas seperti tempat sampah terpisah sehingga masyarakat menganggap semua sampah sama dan tidak perlu dipisahkan. Karena tanpa pemilahan proses daur ulang dan pengolahan sampah tidak bisa dilakukan secara efisien sehingga seluruh sampah berakhir menjadi tumpukan yang sulit ditangani.
2. Jumlah tumpukan sampah yang banyak di beberapa titik yang menunjukkan tingginya volume sampah yang tidak terkelola dengan baik yang dimana Ini disebabkan oleh Warga masih membuang sampah sembarangan dipinggir jalan atau belakang rumah dikarenakan Rendahnya kesadaran masyarakat tentang dampak lingkungan dari sampah yang menumpuk. Terjadi penumpukan sampah karena tidak ada sistem pengelolaan yang terstruktur baik dari segi kebijakan, sarana, maupun perilaku masyarakat.
3. Ketidakteraturan jadwal angkutan sampah menyebabkan sampah rumah tangga tidak terangkat tepat waktu akibatnya volume sampah menumpuk dilingkungan warga dan juga Warga tidak termotivasi untuk mengelola sampah karena tidak ada tindak lanjut dari pihak desa. Jika ada petugas kebersihan jumlahnya mungkin sangat terbatas.

Dengan demikian peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul
**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN
 SAMPAH RUMAH TANGGA SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
 TANGGA DI DESA JUMBA KECAMATAN AMUNTAI SELATAN
 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kepada "Implementasi Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Sungai Durait Tengah Kecamatan babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara" yang berkaitan dengan sub variabel Implementasi Kebijakan menurut teori Donald van Metter & Carl van Horn dalam Leo Agustino (2020:151-153).

1. Standar dan Sasaran Kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana
5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

C. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini yang berjudul "Implementasi Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Desa Jumba Kecamatan Amuntai Selatan kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Jumba, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Jumba?

D. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian ini disusun untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Jumba, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Jumba.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik, lingkungan, dan kebijakan publik, terutama mengenai implementasi kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di tingkat desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan strategi pengelolaan sampah agar lebih efektif dan berkelanjutan di Desa Jumba.

b. Bagi Masyarakat

Dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam mengelola sampah secara mandiri melalui kegiatan pemilahan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi bahan referensi dan acuan dalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di wilayah pedesaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

- 1. Rio (2024) yang berjudul “Implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah di TPA Tamangapa”** Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Tamangapa. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif, dengan menggunakan teori George C. Edward III. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah bergantung pada komunikasi yang efektif, struktur birokrasi yang efisien, dan partisipasi aktif masyarakat. Meskipun berbagai inisiatif telah diterapkan, termasuk pelatihan, sosialisasi, dan pemilahan sampah, tantangan signifikan masih ada, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya fasilitas memadai, dan masalah kesadaran masyarakat. Struktur birokrasi yang fleksibel dan transparan, serta koordinasi yang baik antara lembaga, sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan. Evaluasi menunjukkan bahwa dukungan pemerintah, kolaborasi dengan sektor swasta, dan partisipasi masyarakat adalah kunci untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Makassar.
- 2. Paramita Adhinul Putera (2016) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Sesayap Kabupaten**

Tana Tidung” Program Studi Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik Universitas Terbuka Jakarta. Potensi timbulan sampah di Kecamatan Sesayap merupakan konsekuensi dari pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Peningkatan jumlah volume sampah di Kecamatan Sesayap tentu harus diimbangi dengan kebijakan pengelolaan sampah yang terorganisir dengan baik secara integratif, termasuk kepada dampak yang mungkin ditimbulkan. Mengingat begitu pentingnya pengelolaan sampah, maka perlu adanya peran pemerintah daerah untuk melahirkan kebijakan pengelolaan sampah yang baik dan benar. Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Didasarkan adanya permasalahan mengenai pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap yang belum berjalan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung berdasarkan teori Charles O. Jones tentang tiga pilar utama implementasi kebijakan yaitu: organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini memerlukan sejumlah data lapangan yang bersifat aktual dan konseptual. Sedangkan data-data yang diperlukan diperoleh melalui teknik wawancara, teknik observasi, serta teknik dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya sudah berfungsi dan direalisasikan, kendati hasilnya belum sepenuhnya

efektif. Pada aspek organisasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung harus segera menyusun dan penetapan standar pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Disamping itu, Dinas PU dan Perhubungan sebagai pelaksana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap juga harus meningkatkan koordinasi antar lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap. Pada aspek interpretasi, Dinas PU dan Perhubungan perlu mensosialisasikan program pengelolaan sampah yang baik dan benar kepada masyarakat. Pemberian insentif/gaji kepada petugas lapangan juga perlu menjadi perhatian khusus. Pada aspek aplikasi, Dinas PU dan Perhubungan perlu segera membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sesuai dengan standar kriteria menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Dengan kata lain, perbedaan paling mendasar dari penelitian saya dibandingkan penelitian Rio dan Paramita adalah pada tingkat analisis (desa vs kota/kabupaten), konteks kebijakan (JAKSTRADA vs kebijakan umum), dan fokus permasalahan (implementasi di tingkat masyarakat vs kelembagaan dan birokrasi). Penelitian saya memberikan kontribusi baru dengan menggambarkan kondisi nyata pengelolaan sampah rumah tangga di desa dan bagaimana kebijakan daerah diterjemahkan serta diimplementasikan pada level pemerintahan paling bawah, yang sebelumnya belum banyak dikaji secara mendalam dalam penelitian-penelitian terdahulu.

Selain itu, penelitian Anda berfokus pada fenomena sosial dan lingkungan di tingkat akar rumput (grassroot level), seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, keterbatasan sarana pemilahan, ketidakteraturan pengangkutan sampah, serta kurangnya sosialisasi dan dukungan dari pemerintah desa. Dengan demikian, penelitian Anda menekankan pada aspek implementasi kebijakan dan strategi di tingkat lokal, serta hubungan antara kebijakan kabupaten (JAKSTRADA) dengan penerapan di desa. Pendekatan yang digunakan juga bersifat kualitatif deskriptif, namun dengan penekanan berbeda, yaitu menilai sejauh mana kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dapat diterapkan secara efektif di lingkungan masyarakat desa.

B. TINJAUAN TEORITIS

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Publik

Masyarakat hidup tidak hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri, akan tetapi juga bergantung pada orang lain. Hal tersebut sesuai dengan konsep bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Sama halnya seperti kebijakan publik, hal tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat atau publik untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Kebijakan tadi juga dapat dinilai negatif oleh publik jika pelaksanaannya banyak merugikan masyarakat.

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan

berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang.

Adapun pengertian Kebijakan Publik menurut Friedrich, dalam Leo Agustino (2020: 15) "Suatu tindakan yang diusulkan dari seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang yang diusulkan oleh kebijakan untuk digunakan dan diatasi dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mewujudkan suatu tujuan atau maksud."

Kebijakan Publik Menurut Wilson dalam Leo Agustino (2020: 17) "Tindakan, tujuan, dan pernyataan pemerintah tentang hal-hal tertentu, langkah-langkah yang mereka ambil (atau gagal ambil) untuk menerapkannya, dan penjelasan yang mereka berikan atas apa yang terjadi (atau tidak terjadi)"

Menurut W.I. Jenkins, dikutip dalam Leo Agustino (2020:16) "Seperangkat Keputusan-keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan - keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut"

Berdasarkan berbagai definisi para ahli tentang kebijakan publik, maka Kebijakan Publik adalah kebijakan - kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan tujuan

tertentu di masyarakat dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Menurut Dunn dalam Dikson silitonga (2022:23) ada lima tahapan baku dalam keseluruhan proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Proses ini dimulai dari kegiatan (1) penyusunan agenda (agenda setting), (2) formulasi kebijakan (policy formulation) (3) adopsi kebijakan (policy adoption), (4) implementasi kebijakan (policy implementation), dan (5) penilaian kebijakan (policy assessment).⁴⁶ Proses ini tidak hanya bersifat bertahap (sequential) tetapi juga bersifat siklus (cycle) yang akan selalu berulang untuk memperbaiki titik- titik kelemahan sebuah kebijakan.

b. Tujuan Kebijakan Publik

Fungsi utama dari negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah adapun tujuan kebijakan publik yaitu :

1. *Resources* atau sumber daya, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan untuk mendistribusikan sumber daya negara dan yang bertujuan untuk menyerap sumber daya negara. Misalnya, kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menguasai dan mengelola sejumlah sumber daya.
2. Kebijakan regulatif dan deregulatif, kebijakan *regulative* bersifat mengatur dan membatasi, seperti kebijakan tarif, kebijakan pengadaan barang dan jasa, kebijakan hak asasi manusia, dll. Sedangkan kebijakan deregulatif bersifat liberalisasi, seperti kebijakan privatisasi dan kebijakan penghapusan tarif.
3. *Dinamisme* dan stabilitas, kebijakan dinamis adalah kebijakan yang dirancang untuk memobilisasi sumber daya nasional untuk

mencapai beberapa kemajuan yang diinginkan, seperti kebijakan desentralisasi. Pada saat yang sama, kebijakan stabilitas adalah untuk mencegah dinamika yang terlalu cepat agar tidak merugikan sistem yang ada, baik sistem politik, keamanan, ekonomi, maupun sosial. Contoh dari kebijakan ini adalah kebijakan keamanan nasional dan kebijakan penetapan suku bunga.

4. Penguatan negara dan pasar, kebijakan yang memperkuat negara merupakan kebijakan yang mendorong peran negara lebih besar, seperti kebijakan pendidikan nasional yang menjadikan negara sebagai aktor utama dalam pendidikan nasional dan bukan masyarakat. Sedangkan kebijakan pasar atau public- promoting adalah kebijakan yang mendorong peran publik atau mekanisme pasar yang lebih besar daripada peran negara, seperti kebijakan privatisasi BUMN dan kebijakan Perseroan Terbatas (PT).

2. Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Implementasi

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama - sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan tersebut.

Menurut Mazmainan dan Sabatier dalam Leo Agustino (2020:146) menjelaskan konsep implementasi ialah: "Menjalankan konten atau isi kebijakankedalam aplikasi yang diamanatkan oleh kebijakan itu sendiri".

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.

2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.

3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Aderson dalam Leo Agustino (2020:145) menyebutkan bahwa: "Berarti administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menerapkan kebijakan yang diadopsi dalam upaya mencapai tujuan kebijakan atau program.".

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilannya atau tercapai tidaknya tujuan.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli diatas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai denngan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan.

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan Publik merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah yang biasanya berbentuk sebuah program, yang kemudian program tersebut dapat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Tahapan implementasi kebijakan dapat diartikan pula sebagai tindakan nyata dan konkrit yang dilakukan oleh pemerintah hasil dari rumusan yang telah

dibuat dalam tahapan formulasi. Studi mengenai implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Setelah suatu kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat tercapai tujuannya.

Adapun Penjelasan mengenai studi implementasi menurut Mazmanian & Sabatier dalam (Leo Agustino, 2020:146) adalah sebagai berikut: "Cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dengan kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien".

Menurut Van Meter & Van Horn dalam (Leo Agustino, 2020:146) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: "Tindakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu individu atau pejabat pejabat atau kelompok kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan".

Menurut Saktisyahputra et al Dalam Degdo Suprayanto (2024:7) Implementasi kebijakan publik adalah proses pelaksanaan kebijakan yang telah disahkan. Proses ini melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum. Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dapat dikatakan bahwa pengertian dari implementasi kebijakan pada dasarnya berupa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Tindakan tersebut berasal dari kelompok pemerintah maupun swasta yang memiliki kemampuan untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apaka

kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau baik bagi masyarakat.

Dipertegas oleh Chief J.O Udoji dalam (Leo Agustino, 2020:147) sebagai berikut : "Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa sebuah impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan"

Kebijakan pada dasarnya adalah isi yang menjadi komitmen dari kebijakan, sedangkan perilaku kebijakan yang disebut pula sebagai stakeholder. Adapun yang dimaksudkan dengan lingkungan adalah keadaan sosial politik, sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan, kehidupan lokal, nasional, regional, dan internasional. Kebijakan memiliki sebuah sistem yang saling berhubungan satu sama lain.

c. Faktor-faktor Menentukan Keberhasilan Implementasi

Menurut George C. Edward III dikutip dari Leo Agustino (2020: 155-146) terdapat empat faktor yang sangat menentukan keberhasilan Implementasi suatu Kebijakan yaitu: (1) Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Implementasi Kebijakan Publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah diketahui apa yang akan mereka kerjakan Komunikasi berjalan dengan baik dan sehingga setiap keputusan kebijakan peraturan Implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat,

kaurat dan konsisten. Komunikasi (pentransmisian informasi) diperlukan agar pembuat keputusan dan para implemantor akan semakin konsesten akan melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas yaitu :

- a) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomonikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui tingkat birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- b) Kejelasan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street level bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu / mendua). Ketidajelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para membutuhkan fleksibelitas dalam pelaksana melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewangkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- c) Konsestensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah ubah maka dapt menimbulkan kebingungan bagi pelaksanaan dilapangan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C.Edward III dalam mengimplementasikan kebijakan Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

- a) Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten da kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan sendiri.
- b) Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempuntai dua bentuk, yaitu Pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implemantor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan Kedua informasi mengetahui data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi perintah ditetapkan Implemantor harus

mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

- c) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakanyang ditetapkan secara politik. Ketika itu nihil, maka kekuatan para implemantor dimata tidak terlegitimasi sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.
- d) Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijan. Implemantor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksanaan Kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pelaksanaan pelaksanaan suatu Kebijakan Publik. Jika pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III, adalah :

- a) Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b) Melakukan Pengaturan Birokrasi (staffing the bureaucracy); dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implemenatasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada 'pembentukan' sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode bypassing personil.
- c) Insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

3. Struktur Birokrasi

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah:

- a) Membuat Standar Operating Procedures (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (days-to-days politics) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- b) Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung-jawab pelbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Sedangkan menurut Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2020:151-153), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik. Variabel-variabel tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksanaan kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga.

b. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan

oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

c. Karakteristik Agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian suatu kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, Implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana objek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

d. Sikap atau kecenderungan (disposisi) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi berhasil atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan "dari atas" (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bukan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksana kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi begitupun sebaliknya.

f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi dan politik dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Menurut model implementasi kebijakan publik menurut Daniel

Mazmanian dan Paul Sabatier dikutip oleh (Leo Agustino, 2020:

163-178), ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu keadaan sosial, ekonomi, dan teknologi.

"Dalam hal ini perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintahan dalam hal ini kondisi sosial, ekonomi, dan teknologisangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang. Karena, itu faktor eksternal juga menjadi hal penting untuk diperhatikan guna keberhasilan suatu upaya mengimplementasikan suatu kebijakan".

Dari beberapa model yang telah dijelaskan diatas maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa setiap model yang dikemukakan para ahli, memiliki fokus yang hampir sama, tetapi dalam setiap model dalam beberapa ahli terdapat beberapa faktor yang menonjol bahkan tidak ada pada model lain, hal ini dikarenakan setiap model implementasi memiliki indikator tersendiri sesuai dengan lingkungan dimana kebijakan itu diimplementasikan.

3. Sampah

a. Pengertian Sampah

Menurut Sidik Wasito dalam (Miftahur Rohim, 2020:6) menyatakan bahwa sampah adalah zat padat atau semi padat yang terbuang atau tidak berguna lagi, baik yang dapat membusuk atau yang tidak dapat membusuk kecuali zat buangan atau kotoran manusia.

Sementara didalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/ volume, sumber sampahnya adalah asal timbunan sampah. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau

akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah. pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Sampah terdiri dari :

- a. Sampah Organik adalah sampah yang mudah membusuk dan mudah terurai oleh mikroorganisme yang berasal dari bahan hayati seperti daun, bambu, kayu, sisa makanan dan sejenisnya.
- b. Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang dari bahan non hayati, seperti logam, plastik, kaca, busa/gabus, dan sejenisnya.

Sampah berasal dari beberapa tempat, yakni :

1. Sampah dari pemukiman penduduk pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal disuatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya.
2. Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sayuran busuk, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sampah adalah

material sisa yang dibuang karena material tersebut dianggap tidak berharga sehingga tidak berguna lagi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sampah adalah material sisa yang dibuang karena material tersebut dianggap tidak berharga sehingga tidak berguna lagi.

b. Sumber Sampah

Miftahur Rohim (2020) sumber sampah terdiri dari beberapa tempat antara lain sebagai berikut :

1. Sampah pasar.

Terdiri dari berbagai macam dan jenis sampah seperti sisa sayuran, sisa makanan, kantong plastik bekas, dan sebagainya.

2. Sampah industri

Limbah padat yang dihasilkan oleh industri, merupakan ampas dari pengolahan bahan baku, misalnya pabrik gula tebu yang menghasilkan limbah padat dari tebu yang sudah tidak terpakai lagi.

3. Sampah rumah tinggal, kantor, institusi gedung umum.

Karakteristik dari sampah tersebut hampir sama dengan sumber sampah yang dihasilkan oleh pasar.

c. Jenis – Jenis Sampah

Jenis-jenis sampah jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah institusi / kantor / sekolah, dan sebagainya. Jenis-jenis sampah ialah:

1) Sampah rumah tangga

Yaitu sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa- sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan dari proses alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah atau dari kompleks perumahan.

2) Sampah sejenis sampah rumah tangga

Yaitu sampah rumah tangga yang berasal bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain seperti pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal, pelabuhan, industri, taman kota dan lainnya.

3) Sampah spesifik

Yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti baterai bekas, bekas toner dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis), sampah akibat bencana, punggongkaran, sampah yang secara teknologi belum dapat di olah, sampah yang timbul secara periode (sampah hasil kerja bakti).

d. Dampak Sampah

Sampah mempunyai potensi atau dampak negatif untuk mencemari lingkungan, masyarakat beranggapan bahwa sampah dapat

menimbulkan perasaan tidak estetik, perasaan kotor dan mengganggu pemandangan mata. Sampah organik paling banyak dihasilkan oleh aktifitas manusia seperti, pembuangan sisa sisa makan yang membusuk akan menimbulkan bau dan mencemari udara. Bila sampah organik yang membusuk terkena sumber air warga, maka air tersebut sudah tercemar dari segi bau, warna, rasa, penyakit dan organisme pathogen lainnya. Pencemaran melalui aliran sungai akan cepat menyebar ke daerah hilir sungai. Berikut ini potensi negatif dari sampah :

1. Tempat berkembang dan sarang dari serangga dan tikus.
2. Menjadi sumber pencemaran tanah, air permukaan, air tanah dan udara.
3. Dapat menjadi sumber dan tempat hidup dari kuman-kuman yang membahayakan kesehatan.

4. Pengertian Desa

Menurut Eko, Sutoro. (2019:22) Desa adalah arena politik, sosial, ekonomi, dan budaya tempat warga berinteraksi dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Desa memiliki karakteristik sebagai komunitas lokal yang otonom, mandiri, dan berakar kuat pada nilai-nilai lokal serta adat yang hidup di masyarakat. Pemerintahan desa tidak hanya merupakan birokrasi kecil dari negara, tetapi juga lembaga yang mewujudkan demokrasi dan kemandirian masyarakat desa. sebagian besar bermatapencaharian di bidang agraris serta berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Menurut Syafrudin (2020:37) Desa merupakan satuan wilayah yang ditinggali oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal, hidup bersama dalam hubungan sosial yang kuat, dan mengatur kehidupannya secara mandiri berdasarkan norma-norma sosial serta adat istiadat yang berlaku. Pemerintahan desa adalah bentuk pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat yang memiliki fungsi pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan lokal.

Menurut Nurcholis, Hanif (2018:27) Manfaat keberadaan desa adalah sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan, serta pembangunan yang partisipatif. Desa menjadi basis pemerintahan terendah yang berfungsi mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan, menumbuhkan demokrasi lokal, dan memperkuat kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki.

1. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Dalam mengatasi permasalahan tentang sampah, Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati (PERBUB) No. 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara (JAKTRADA) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga. Pokok kebijakan dalam (JAKTRADA) ini adalah dalam Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yaitu. pembatasan timbunan sampah, pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik.

Pada pasal 1 disebutkan bahwa Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk

tinja dan sampah Spasifik. Sedangkan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lain lainnya.

Dalam pasal 2 disebutkan bahwa arah kebijakan JAKTRADA ini ialah:

- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pada pasal 3 ayat (3) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di lakukan melalui pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari TPST menuju TPA, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Kebijakan tentang pengelolaan sampah ditetapkan untuk lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sehat dan bersih dari sampah. Dalam Kebijakan ini, pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, menyediakan TPS dan TPA di tempat yang telah ditentukan, mengangkut sampah yang telah

dikumpulkan oleh masyarakat dari TPS ke TPA, membersihkan sampah yang ada di jalan-jalan dan tempat-tempat umum tertentu serta mengumpulkannya ke TPS, mengangkut sampah yang telah dikumpulkan dari jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu dari TPS ke TPA, hingga memproses sampah di TPA.

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini berangkat dari adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara (JAKSTRADA) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi seluruh wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, termasuk Desa Jumba Kecamatan Amuntai Selatan. Peraturan ini mengatur secara komprehensif tentang bagaimana pengelolaan sampah seharusnya dilakukan, mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir sampah. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pemerintah desa dapat melaksanakan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

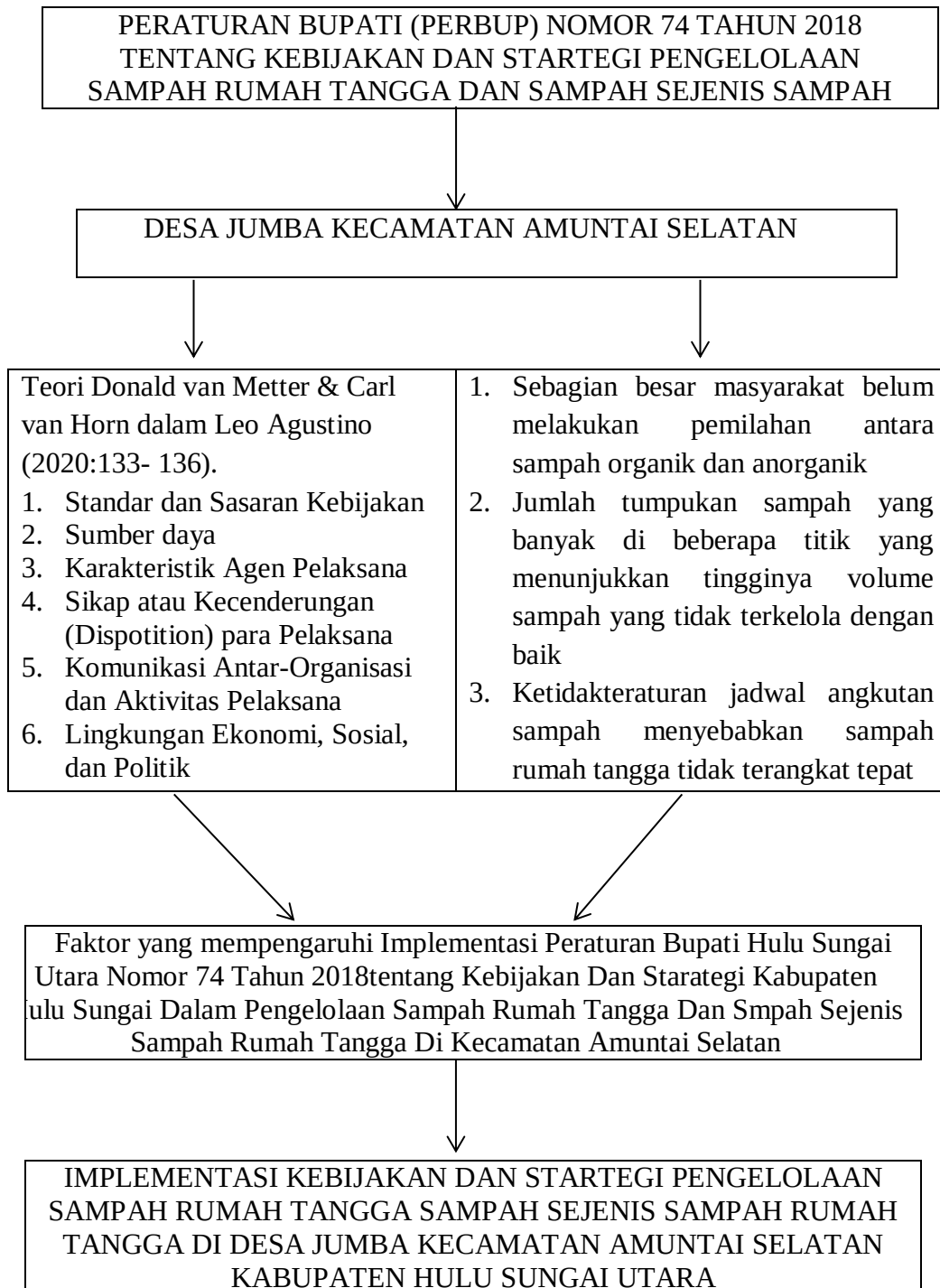
Namun, berdasarkan kondisi lapangan yang terjadi di Desa Jumba, pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari berbagai permasalahan yang masih muncul, seperti sebagian besar masyarakat belum melakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik, adanya tumpukan sampah di beberapa titik yang menunjukkan tingginya volume sampah yang tidak terkelola dengan baik, serta ketidakteraturan jadwal pengangkutan sampah yang menyebabkan penumpukan di lingkungan warga.

Fenomena-fenomena ini mencerminkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dan belum maksimalnya peran pemerintah desa dalam mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati tersebut.

Untuk menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga serta sampah sejenis rumah tangga dapat diterapkan di Desa Jumba, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Leo Agustino (2020:133–136). Menurut teori ini, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Gambar 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Jumba kode pos ,Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Alasan peneliti mengambil lokasi ini adalah karena adanya faktor-faktor permasalahan dalam Implementasi Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenis Sampah Rumah Tangga

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang berjudul “Implementasi Kebijakan Dan Starategi Kabupaten Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Desa Jumba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara”

Menurut Sugiyono (2022:15) Pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (natural setting), di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.”

C. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian diskriptif-kualitatif. Dengan menggunakan jenis penelitian ini peneliti ingin memberikan gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang “Implementasi Kebijakan Dan Starategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Desa Jumba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara”.

Penelitian jenis diskriptif adalah menyajikan data yang tidak hanya sekedar ringkasan tetapi dapat membantu peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan mengklarifikasi kejadian dalam penelitian.

D. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data menurut Sugiyono (2016: 231) Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain yang peneliti perlukan adalah sebagai berikut:

1. Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui perantara instansi-instansi pemerintah yang terkait erat dengan penelitian ini atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data yang biasanya melalui perantara lewat orang lain atau dokumen-dokumen seperti buku-buku, artikel-artikel serta dokumentasi berupa rekaman suara dan foto-foto.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga

mempermudah peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang sedang diteliti, yang menjadi kepedulian dalam pengambilan sampel penelitian kualitatif adalah tuntasnya pemerolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan pada banyak sampel sumber data.

Tabel 3.1

Daftar Informan

No	Nama	Jumlah
1	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	1
2	Kabid	1
3	Sekretaris Desa Jumba	1
4	Aparat Desa Jumba	2
5	Masyarakat Desa Jumba	3
6	Petugas Kebersihan	3
Total		11 orang

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian adalah alat atau fasilitas yang di gunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti lebih cepat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah di olah. Variasi jenis instrumen penelitian adalah angket, ceklis, daftar centang, pedoman wawancara, dan pedoman pengamatan. Pedoman

wawancara serta dokumentasi yang digunakan untuk menggambarkan atau mengungkapkan gambaran lapangan dan hasilnya akan di olah/di analisa sedemikian mungkin untuk mencapai gambaran terhadap hasil tersebut.

Rancangan penelitian masih sementara dan akan berkembang setelah berada di lapangan. Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian lebih jelas, maka akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan melengkapi data dan membandingkan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.

Berikut ini adalah desain operasional penelitian mengenai Implementasi Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah di Desa Jumba ini adalah :

Tabel 3.2
Instrumen Penelitian

Variabel	Instrumen	Indikator
Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn dalam Leo Agustina (2020:133-136)	Standar dan sasaran Kebijakan	1. Kejelasan tujuan dan arah kebijakan 2. Sasaran kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan
	Sumber Daya	1. Ketersedian sumber daya manusia yang kompeten 2. Kecukupan dana atau anggaran untuk melaksanakan kebijakan
	Karakteristik agen Pelaksana	1. Struktur organisasi pelaksana jelas dan efektif 2. Koordinasi antarbagian dalam lembaga

		pelaksana berjalan lancar
	Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para pelaksana	1. Motivasi dan semangat kerja pelaksana 2. Etika dan tanggung jawab pelaksana dalam melaksanakan kebijakan
	Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas pelaksana	1. Kejelasan alur komunikasi antar instansi pelaksana 2. Adanya mekanisme pelaporan dan evaluasi yang efektif
	Lingkungan Sosial, Ekonomi, atau Politik	1. Kondisi ekonomi masyarakat mendukung pelaksana kebijakan 2. Dukungan sosial masyarakat terhadap kebijakan

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2020:105) menyatakan bahwa secara umum terdapat 3 (tiga) macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

1. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2020:109) observasi adalah kondisi dimana dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik (menyeluruh).

2. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2020:114) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2020:124) dokumentasi merupakan pengumpulan dari catatan peristiwa yang sudah berlaku baik berbentuk tulisan, gambar/foto atau karya-karya monumental dari seseorang/instansi.

G. Teknik Analisis Data

Setelah dilakukannya wawancara dan pengujian terhadap data primer dan sekunder maka, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan analisa dan pembahasan dari hasil uji dan wawancara yang telah dilakukan.

Menurut Sugiyono (2020:131) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

H. Uji Kreadibilitas

Menurut Sugiyono (2019:365) uji kreadibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.

1. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rappor*t, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

4. Analisis kasus negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu.

5. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.

6. Melakukan *Member check*

Member check adalah, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2022, *Buku Pedoman Penyusunan dan Penelitian Skripsi*. STIA Amuntai
- Anonim, 2008, *Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*
- Anonim, 2018, *Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*
- Oleh Rio, 2024, *Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tamangapa* Dari Universitas Muhammadiyah Makassar
- Paramita Adhinul Putera, 2016, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung* Dari Universitas Terbuka Jakarta.
- Agustina, Leo, 2020, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta
- Dian Suluh Kusuma Dewi 2022 *Buku ajar kebijakan publik: proses, implementasi dan evaluasi*
- Sumber: repository Universitas Medan Area
(https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1590/5/141801060_file%205.pdf)
- Miftahur rohim, 2020, *Teknologi Tempat Guna Sampah, Pasuruan: Qiara medis*
- sugiyono, 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung Afebata
- Sugiyon, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung Afebata
- Sugiyono 2022, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung Afebata
- Dikson Silitonga 2022 *evaluasi Implementasi Kebijakan Publik*
- Degdo Suprayitno 2024 *Buku ajar kebijakan publik*
- Sugiyon, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung Afebata
- Nurcholis, Hanif. (2018). *Pemerintahan Desa di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Syafrudin. (2020). *Tata Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Eko, Sutoro. (2019). *Revolusi dari Desa: Pembangunan, Demokrasi, dan Kedaulatan Lokal*. Yogyakarta: FPPD Press.